

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2023**



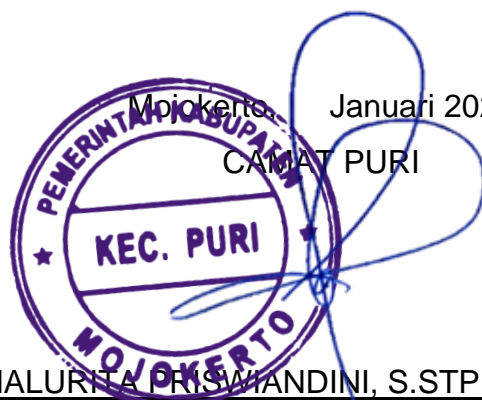
**KANTOR KECAMATAN PURI
KAB. MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.



NALURITA PRISMANDINI, S.STP.M.Med.Kom
Pembina Tk.I
NIP. 19810402 199912 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri disusun untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Puri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Puri juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance.

Di dalam penyusunan LKJIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri tahun 2021-2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama yang teruang didalamnya yaitu :

1. Nilai IKM
2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
4. Nilai SAKIP Kecamatan
5. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
6. Indeks Profesionalitas ASN
7. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Puri menjalankan 3 Program 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan mengelola Anggaran sebesar Rp 3.197.701.827,00 atau mencapai 93,32%. Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

Hal

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Isu Strategis.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Kecamatan Puri.....	7
A.1 Tujuan dan sasaran	7
B. Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Puri	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. CAPAIAN KINERJA.....	12
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	12
b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	13
c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun Renstra	14
d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional.....	14
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
a). Analisis Penyebab Keberhasilan	17
b). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	19
C. REALISASI ANGGARAN.....	21
BAB IV PENUTUP	24
A. KESIMPULAN.....	24
B. SARAN.....	24
LAMPIRAN	25

Lampiran-lampiran :

1. Matriks Renstra Kecamatan Puri 2021 - 2026
2. Matriks Renja P-APBD Kec. Puri Tahun 2023
3. Realisasi Anggaran dan Berita Acara Evaluasi Internal Kec. Puri Tahun 2023
4. Struktur Organisasi OPD Kecamatan Puri 2023

5. IKU / IKI Kecamatan Puri Tahun 2023
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
8. Portal E-81 (Pengukuran Capaian Kinerja) tahun 2023
9. Penilaian Mandiri IP ASN Tahun 2023
10. Nilai IIKM Tahun 2023
11. Casscading dan MPH Tahun 2023
12. SOP Penyusunan LKJIP, SOP Pengolahan Data, SOP Pengukuran Kinerja
13. Penghargaan Tahun 2023
14. Informasi Inovasi Tahun 2023
15. RATL Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Puri Tahun 2023
16. Laporan Kinerja Individu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan Nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Puri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Puri juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

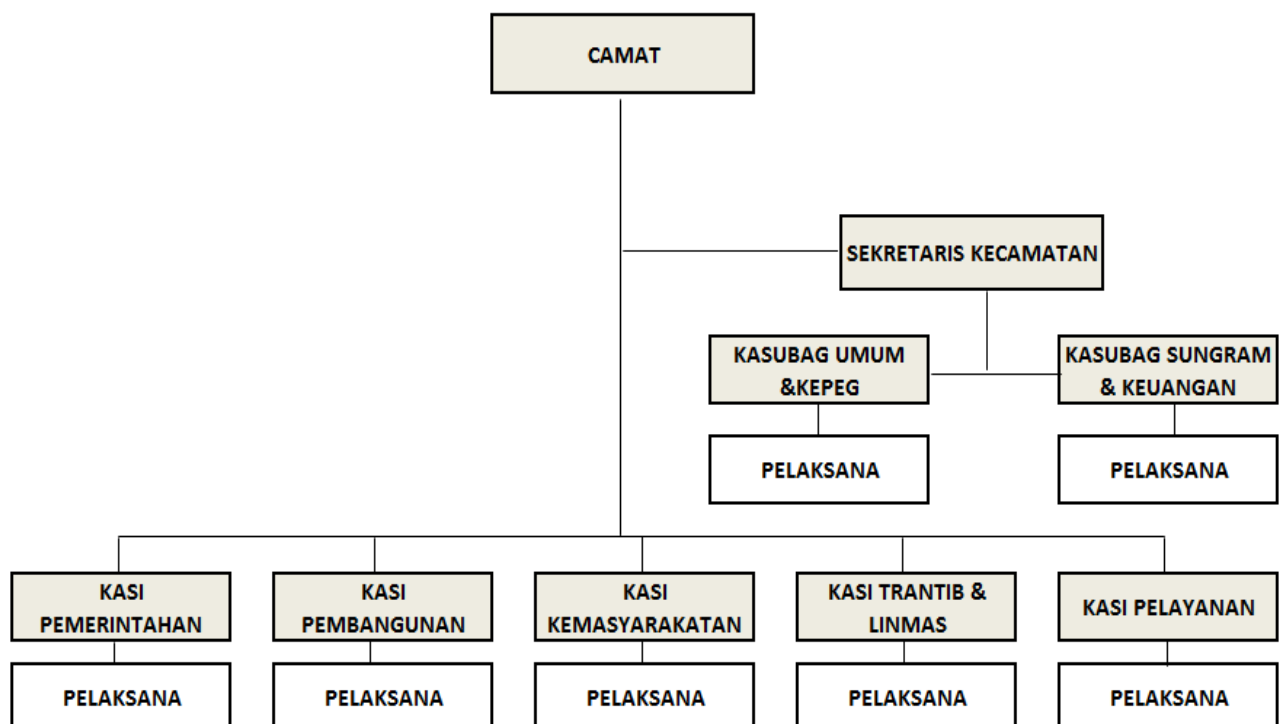
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Pejabat Pengawas : 6 Orang
4. Pelaksana : - PNS : 9 Orang
- THL : 5 Orang

STRUKTUR ORGANISASI KEC.PURI KAB.MOJOKERTO

(Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016)



C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Puri berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km² yang terdiri dari 2.276,181 km² lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Puri terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Puri sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Kota Mojokerto
- o Sebelah Timur : Kecamatan Dlanggu
- o Sebelah Selatan : Kecamatan Jatirejo
- o Sebelah Barat : Kecamatan Sooko, Kec. Trowulan

PETA WILAYAH KECAMATAN PURI



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Puri mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara administratif kecamatan Puri terdiri dari 16 desa dan 68 dusun dengan jumlah RW sebanyak 142 dan RT sejumlah 449 serta jumlah penduduk sebanyak 76.977 jiwa dan potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Puri denga rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumla Penduduk kecamatan Puri Per 31 Desember 2023

NO.	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TAMPUNGREJO	1.493	1.462	2.955
2	PLOSOSARI	2.158	2.068	4.226
3	KINTELAN	2.118	2.053	4.171
4	BRAYUNG	1.464	1.447	2.911
5	KETEMASDUNGUS	1.226	1.233	2.459
6	PURI	2.237	2.142	4.379
7	TANGUNAN	1.205	1.181	2.386
8	KEBONAGUNG	1.781	1.745	3.526
9	SUMBERGIRANG	2.965	2.864	5.829
10	MLATEN	2.588	2.571	5.159
11	MEDALI	2.479	2.319	4.798
12	BALONGMOJO	2.238	2.182	4.420
13	SUMOLAWANG	3.646	3.592	7.238
14	TAMBAKAGUNG	3.621	3.605	7.226
15	KENANTEN	3.270	3.278	6.548
16	BANJARAGUNG	4.405	4.341	8.746
JUMLAH		38.894	38.083	76.977

Sumber data : Data Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto

Tabel 1.2
Potensi Ekonominya Kecamatan Puri Tahun 2023

No.	Desa	Potensi Ekonomi
1	TAMPUNGREJO	Pusat oleh-oleh dan Cemilan
2	PLOSOSARI	Sentra Produksi Tape Ketan Ijo
3	KINTELAN	Sentra Produksi Sepatu Sport
4	BRAYUNG	Sentra Produksi Tas Fashion
5	KETEMASDUNGUS	Sentra Produksi Sepatu Santai

6	PURI	Sentra Produksi Bakpia
7	TANGUNAN	Kuliner Sate Gule
8	KEBONAGUNG	Budidaya Lele
9	SUMBERGIRANG	Sentra Produksi Keritapong
10	MLATEN	Sentra Produksi Gerabah
11	MEDALI	Sentra Produksi Sepatu Resmi
12	BALONGMOJO	Sentra Produksi Pentol dan Sepatu/Sandal
13	SUMOLAWANG	Sentra Kerajinan Topi
14	TAMBAKAGUNG	Sentra Produksi Tahu
15	KENANTEN	Sentra Kerajinan Sandal
16	BANJARAGUNG	Sentra Kerajinan Kopyah/Topi

Sumber data : Profil Desa Kecamatan Puri

D. Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Puri selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kecamatan Puri

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berintegritas, Akutanbel, Bersih, Transparan.**

A.1 Tujuan dan sasaran

Berdasarkan misi tersebut diatas, Kecamatan Puri menetapkan tujuan dan sasaran untuk misi 3 sebagai berikut :

Tujuan misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal

Sasaran misi 3 : - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan
 - Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanab public yang Optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Matrik Renstra Kecamatan Puri Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi/ perhitungan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kecamatan		84	85	86	87	88
2		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat	Nilai SAKIP	Jumlah Nilai SAKIP Perangkat Daerah ----- x 100% Tingkat Kepuasan	83	84	85	86	87

		Daerah		terhadap nilai SAKIP Perangkat Daerah					
3		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	Jumlah pelayanan melalui pembangunan ----- x 100% Tingkat kepuasan terhadap pelayanan melalui pembangunan	83	84	85	86	87

Sumber data : Dokumen Renstra Kecamatan Puri periode 2021-2026

B . Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Puri

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Puri Tahun 2023 mengacu pada Tujuan Kecamatan Puri yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan 2 sasaran yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dan Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah di dukung dengan Program dan kegiatan antara lain :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 5) Penyediaan Bbn Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
- c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2023 Perjanjian Kinerja Kecamatan Puri ada perubahan, berikut informasi Perjanjian Kinerja Kecamatan Puri kondisi sebelum perubahan dan setelah Perubahan sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
(SEBELUM PERUBAHAN)
KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,66
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84
		Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah : 1. Prosentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan Target : 100 % 2. Prosentase Hasil Fasilitasi Koordinasi dan Rekomendasi yang ditindaklanjuti Target : 100 %	100%
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90 %
		Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	74
2.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM	85
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.111.839.000,00	APBD 2023

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 45.000.000,00	APBD 2023
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 366.740.000,00	APBD 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PURI KABUPATEN
MOJOKERTO**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	1.1 Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	2.1 Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	84
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,65%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	74
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 inovasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.019.088.000,00	P APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 45.000.000,00	P APBD 2023
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 362.577.158,00	P APBD 2023

Sumber data : Dokumen PK dan PK Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Puri

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Puri Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Puri Tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Puri Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	90	93,57	103,97%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	84	84,87	101,04%
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,65	93,32	98,59%
		3.3 Indek Profesionalitas ASN	74	88,65	119,77%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	7 Inovasi	100%

Sumber data : Data Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Uraian Penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya untuk semua indikator capaian kinerja yang direncanakan semuanya dapat tercapai dari target yang telah direncanakan melalui perjanjian kinerja Camat Puri tahun 2023, kecuali target Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah karena adanya pegawai yang pensiun dan kekosongan jabatan eselon IV sehingga penyerapan anggaran untuk gaji dan tunjangan tidak bisa maksimal.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun lalu dengan dua tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI		
			Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai IKM	90	89.02	89.32	93,57
	Persentase rekomendasi fasilitasi serta hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial.	100%	100 %	100 %	100%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84	82,43	84,43	84,87
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,65	77,39	94.63	93,32
	Nilai Indeks Profesionalisme ASN	74	-	77,33	88,63

Sumber data : BA hasil pengukuran Kinerja Tim Sakip Kecamatan Puri

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2023 secara umum terjadi kenaikan capaian realisasi target kinerja secara umum dibanding dengan realisasi tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya hal ini dipengaruhi adanya dukungan anggaran dan dokumen dokumen yang lainnya.

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Puri Kab. Mojokerto tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai IKM	88	93,57	106,33
Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	87	84,87	97,55

Sumber data : BA hasil pengukuran Kinerja Tim Sakip Kecamatan Puri

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat sudah mencapai target yang diinginkan dan untuk dapat meningkatkan realisasi pada akhir masa tahun rencana strategis 2021-2026 , sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan Puri masih harus meningkatkan nilai yang cukup agar dapat mencapai target pada akhir masa rencana strategis 2021-2026.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,57	-	-
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Nilai Sakip	84,87	-	-

Sumber data : BA hasil pengukuran Kinerja Tim Sakip Kecamatan Puri

Tabel 3.5
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp 407.577.158	11,89
2	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	Rp 3.019.088.000	88,11

Sumber data : Laporan Keuangan Kecamatan Puri

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tata Kelola birokrasi di kecamatan puri didukung anggaran sebesar 88,11 % dari total anggaran yang ada, sedangkan untuk mewujudkan pelayanan public yang optimal hanya didukung anggaran 11,89 % dari total anggaran yang ada di tahun 2023, berikut kami sajikan tabel target pencapaian kinerja dan anggaran sebagai tabel berikut :

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	93,57	103,97%	407.577.158	399.271.300	97,96%
1. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	45.000.000	44.355.300	98,57%
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	362.577.158	354.916.000	97,89 %
Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	84	84,87	101,04%	3.019.088.000	2.798.430.527	92,69%

Sumber data : Laporan Keuangan Kecamatan Puri

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Sasaran Pertama Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal, dengan indikator nilai IKM Kecamatan, target 90 realisasi 93,57 dengan capaian 103,97 %, Adapun program yang dilaksanakan adalah :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Program tersebut diatas dimaksudkan untuk mengetahui hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, target dari kegiatan ini sebesar 100%. Realisasi yang dicapai per tanggal 31 Desember 2023 adalah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa target dapat tercapai 100%.

Sasaran kedua Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel, dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan Puri dan Nilai Sakip dari Target Nilai Sakip tahun 2023 : 84 didapat nilai tahun 2023 : 84,87 sehingga tercapai 101,04%, Adapun Program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan :

- Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

1. Untuk Sasaran Kinerja Kecamatan Puri yang pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal indikator kinerja IKM Kecamatan Puri pada tahun 2023 tercapai sebesar 93,57 dari target 90 sehingga prosentase capaiannya 103,97 % dengan kategori sangat baik, pencapaian ini didukung dengan kegiatan survey yang dilakukan setiap hari dan setiap akhir bulan langsung dihitung nilai IKM nya, hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat dari 9 unsur yang mengalami peningkatan paling baik adalah Penanganan Pengaduan, Masukan dan Saran dan unsur Biaya / Tarif, karena semua pelayanan di kecamatan Puri dilayani dengan cepat, tepat dan tidak dikenakan biaya alias gratis.
2. Sasaran kinerja kedua yaitu terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan indikator kinerja persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dari target 100 % realisasi 100% capaian 100% dengan kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan evaluasi dan perbaikan SOP secara kontinyu serta peningkatan kualitas petugas pelayanan.
3. Sasaran kinerja ketiga yaitu terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan indikator kinerja persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dari target 100% realisasi 100% capaian 100% dengan kategori sangat baik hal ini didukung dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan para Seksi di Kecamatan Puri setiap awal pekan
4. Sasaran kinerja keempat yaitu Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel memiliki 3 Indikator, yaitu :
 - a. Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target 84 realisasi 84,87 dengan capaian 101,04% dengan kategori memuaskan hal ini didukung dengan kegiatan evaluasi rencana kegiatan semua seksi dan sub bagian setiap minggu oleh Kepala OPD sehingga memacu kinerja yang lebih baik untuk semua Pegawai di Kecamatan Puri
 - b. Indikator kinerja persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dari target 94,65% realisasi 93,32% capaian 98 % dengan kategori sangat baik meskipun belum memenuhi target hal ini dicapai dengan evaluasi

serapan anggaran setiap bulan oleh Kepala OPD kepada masing-masing PPTK sebagai bahan untuk evaluasi Kepala OPD oleh Kepala Daerah yang juga dilakukan setiap bulan secara rutin, adapun target tidak dapat diserap secara maksimal karena adanya pegawai yang pensiun dan kekosongan jabatan eselon IV sehingga penyerapan anggaran untuk gaji dan tunjangan tidak bisa maksimal.

- c. Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN dari target 77 realisasi 88,63 dengan capaian 119,77% sudah memenuhi target, untuk Tahun 2023 seluruh ASN di Kecamatan Puri telah diikutsertakan dalam diklat-diklat yang diadakan oleh BKPSDM dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puri melalui Peningkatan Kompetensi ASN dalam Pengenalan IT di Bumi Asriloka Wonosalam pada bulan Maret 2023.
5. Sasaran Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan target 7 inovasi terealisasi 7 inovasi capaian 100% hal ini didukung dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan oleh Kepala OPD dan para Seksi di Kecamatan Puri setiap awal pekan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan antara lain :

1. Menghitung nilai IKM setiap bulan sehingga tahu variabel mana yang masih rendah dan perlu ada perbaikan disetiap bulannya
2. Melakukan revisi dan perbaikan standart pelayanan dan SOP di kecamatan Puri secara berkala
3. Perbaikan mental aparatur ASN Kecamatan Puri untuk lebih meningkatkan kinerjanya
4. Melakukan rapat staff rutin yang dilakukan satu minggu sekali untuk evaluasi kinerja masing-masing seksi dan sekretariat
5. Monitorig dan evaluasi kinerja ASN secara rutin setiap bulan untuk mengetahui rencana kegiatan dan pencapaian target kinerjanya
6. Meningkatkan skill petugas dengan mengikutkan Bimtek maupun Pelatihan
7. Perbaikan dan penambahan sarana prasarana yang ada
8. Membuat inovasi-inovasi baru baik dibidang pelayanan maupun pemerintahan secara umum.
9. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan.

Bukti keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran pertama, Kecamatan Puri menjadi Kecamatan berkinerja terbaik pada penilaian Kinerja kecamatan tahun 2023, Kecamatan Puri menjadi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023 Tingkat Nasional dan Peringkat Pertama Tingkat Nasional Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2023.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	103,97	97,96	2,04
2	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	101,04	92,69	7,31

Sumber data : Laporan Keuangan Kecamatan Puri

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum penyerapan anggaran terealisasi dengan maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Segala sumberdaya yang ada telah digunakan seefisien mungkin baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana untuk menunjang kerja menjadi lebih baik dan lebih meningkat.

Tabel 3.8
PENYAJIAN DATA KINERJA
PEHITUNGAN TARGET DAN REALISASI CAKUPAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2023

NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	%
1	2	3	4	5
A.	PELAYANAN BIDANG PERIJINAN	0	0	-
	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) paling besar 200 m2, tidak bertingkat, dan kecuali pengembang perumahan, serta tidak untuk tempat usaha	0	0	-
B.	PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN	100	100	100
	1 Penetapan gaji berkala pegawai staf Kecamatan	12	12	100
	2 Pemberian izin cuti Pegawai staf Kecamatan	3	3	100
	3. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Kecamatan	3	3	100
	4 Penetapan Batas Usia Pensiun Pegawai Kecamatan	5	5	100
	5 Pengusulan Pegawai yang mengikuti Pendidikan formal	3	3	100
	6 Pengusulan Pegawai untuk mengikuti Peningkatan Potensi SDM	22	22	100
	7 Pengusulan Pegawai untuk mengikuti Diklat PIM	-	-	100
	8 Pelantikan Pejabat Kepala Desa	0	0	100
	9 Pelantikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antar Waktu	1	1	100
	10 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	16	16	100
	11 Pemberian Rekomendasi atas permohonan Subsidi BBM	130	130	100
	12 Menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Nikah	27	27	100
	13 Menerbitkan Surat Keterangan, Legalisir, Proposal Subsidi Listrik	209	209	100
	14 Menerbitkan Surat Keterangan Jampersal	71	71	100
	15 Menerbitkan Surat Keterangan untuk penelitian	2	2	100
	16 Menerbitkan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris	509	509	100
	17 Menerbitkan Surat Administrasi Kependudukan	5.080	5.080	100
	18 Menerbitkan Surat Keterangan lain-lain (PPATS)	22	22	100
	19 Jumlah Pelayanan yang dilayani selama tahun 2023 di Kec. Puri	700	6.115	873,57

(Sumber : Data Seksi Pelayanan dan Kepegawaian Kec. Puri)

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk target pelayanan di tahun 2023 sebanyak 700 pelayanan, pencapaian indikator pelayanan dapat dicapai sebanyak 6.115 pelayanan atau 873,57%, adapun faktor pendorong adalah pelayanan kependudukan yang mulai beroperasi di kecamatan semakin meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus adminitrasi kependudukannya, karena dirasa lebih dekat dan lebih singkat dalam waktu pelayanannya.

Tabel 3.9

Perbandingan Jumlah Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.019.088.000	2.798.430.527	92,69
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.000.000	44.355.300	98,57
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	362.577.158	354.916.000	97,89

C. REALISASI ANGGARAN

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Puri Tahun 2023 sebesar Rp. 3.426.665.158,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.197.701.827,00 atau 93,32 % dengan rincian per program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD KECAMATAN PURI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023		Selisih (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.019.088.000,00	2.798.430.527,00	220.657.473,00	92,69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	13.970.000,00	1.030.000,00	93,13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.970.000,00	30.000,00	98,50

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	88,89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.459.678.000,00	2.280.137.064,00	179.540.936,00	92,70
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.678.000,00	2.277.137.064,00	179.540.936,00	92,69
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.439.900,00	15.316.000,00	123.900,00	99,20
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.439.900,00	15.316.000,00	123.900,00	99,20
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.750.000,00	207.083.350,00	21.666.650,00	90,53
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.569.000,00	431.000,00	95,69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.550.000,00	116.205.000,00	10.345.000,00	91,83
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.500.000,00	26.481.000,00	2.019.000,00	92,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	11.873.000,00	627.000,00	94,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.200.000,00	2.660.000,00	540.000,00	83,13
	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	25.462.350,00	4.537.650,00	84,87
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.000.000,00	14.833.000,00	3.167.000,00	82,41
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	-
	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.020.100,00	113.272.296,00	13.747.804,00	89,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.020.100,00	39.550.834,00	7.469.266,00	84,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000,00	73.721.462,00	6.278.538,00	92,15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.200.000,00	168.651.817,00	4.548.183,00	97,37

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.500.000,00	49.601.000,00	2.899.000,00	94,48
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.700.000,00	94.090.817,00	1.609.183,00	98,32
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000,00	44.355.300,00	644.700,00	98,57
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	45.000.000,00	44.355.300,00	644.700,00	98,57
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	45.000.000,00	44.355.300,00	644.700,00	98,57
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	362.577.158,00	354.916.000,00	7.661.158,00	97,89
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	362.577.158,00	354.916.000,00	7.661.158,00	97,89
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	81.440.000,00	79.319.500,00	2.120.500,00	97,40
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	43.137.158,00	39.792.000,00	3.345.158,00	92,25
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.000.000,00	101.849.500,00	150.500,00	99,85
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	136.000.000,00	133.955.000,00	2.045.000,00	98,50
	JUMLAH	3.426.665.158,00	3.197.701.827,00	228.963.331,00	93,32

Dari total belanja langsung OPD Kecamatan Puri Tahun 2023 sebesar Rp.3.426.665.158,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.197.701.827,00 atau 93,32%. Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp 228.963.331,00 sebagian besar berasal dari sub kegiatan gaji dan tunjangan, hal ini karena adanya pegawai yang pensiun dan kekosongan jabatan eselon IV sehingga penyerapan anggaran untuk gaji dan tunjangan tidak bisa maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Puri, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2023 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator sasaran kinerja kegiatan Tahun 2023, 1 indikator kinerja mencapai 103,97 % yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dan 1 indikator kinerja yang mencapai 101,04 % yaitu Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama, cermat merupakan langkah guna menekan jarak/ kesenjangan antara target dan realisasi.
- Pada tahun–tahun mendatang efisiensi dan manfaat anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

B. SARAN

Demi tercapainya sasaran organisasi dan perbaikan di tahun yang akan datang, Kecamatan Puri perlu melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

1. Mengupayakan efisiensi / penghematan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang dapat ditekan anggarannya
2. Mengusulkan penambahan jumlah aparatur untuk mengimbangi aparatur yang pensiun dan pindah tugas.



NALURITA PRISWIANDINI, S.STP.M.Med.Kom
Pembina Tk.I
NIP. 19810402 199912 2 001

LAMPIRAN